

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti Indonesia telah menjadi wacana publik. Tidak demikian halnya dengan sekolah, karena realitanya mati atau hidupnya suatu sekolah ditentukan oleh ada – tidaknya siswa yang bersekolah. Siswa adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu” (UU SPN Nomor 20/2003 Pasal 1 ayat 4) Agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di sekolah, maka siswa harus dipersiapkan secara baik dan terprogram (Maria Dominika Niron, 2011).

Kegiatan penerimaan siswa baru adalah program kegiatan sekolah dalam mencari dan menentukan calon siswa yang akan bersekolah pada suatu sekolah. Kegiatan penerimaan siswa baru bagi sekolah merupakan hal penting dalam rangkaian kegiatan manajemen peserta didik, karena kegiatan ini menentukan apakah sekolah akan memperoleh kuantitas dan kualitas siswa dalam kelas sesuai standar, serta siswa yang diterima memiliki kemampuan awal yang cukup untuk belajar, siswa yang diterima siap untuk belajar baik secara fisik maupun mental. Hal ini penting karena yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. (Maria Dominika Niron, 2011).

Dalam membangun sistem penerimaan siswa baru ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan manajemen siswa, diantaranya

adalah sistem penerimaan siswa baru yang terbuka dan adil. sistem penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil mengandung makna, bahwa strategi penerimaan siswa baru yang dikembangkan sekolah harus dapat menjamin semua warga negara Indonesia (anak Indonesia) pada usia sekolah tanpa ada diskriminasi dapat di terima untuk bersekolah.

Menurut Maria Dominika dalam seminar dan konferensi *internasional ICEMAL* mengatakan bahwa penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam melakukan manajemen siswa, maka sistem penerimaan siswa baru yang 'memberatkan' masyarakat/calon siswa, dilihat dari: waktu pelaksanaan penerimaan siswa, materi seleksi siswa, masuk sekolah perlu ditinjau kembali oleh pihak sekolah, karena melanggar hak asasi anak memperoleh kesempatan mendapat pendidikan secara terbuka dan adil, serta telah menciptakan kondisi diskriminasi terhadap anak.

Lihat saja setiap menjelang tahun ajaran baru, Sekolah, menyelenggarakan kegiatan penerimaan siswa baru, mulai dari satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK) sampai dengan pendidikan sekolah menengah, pada saat yang bersamaan pula para orang tua kalang kabut untuk mencarikan sekolah bagi putra putrinya, karena persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dalam penerimaan calon siswa baru berbeda-beda, ada sekolah yang menetapkan hasil nilai ujian seleksi dan ada pula dengan biaya yang mahal.

Bagaimana jadinya dengan para siswa yang memiliki hasil nilai ujian seleksi belajarnya pas-pasan, lebih rendah atau berada di bawah batas nilai

rata-rata minimal yang ditetapkan oleh sekolah?, Apakah mereka terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikannya? Atau, mereka harus mencari sekolah yang mungkin berada relatif jauh dari tempat tinggalnya. Menghadapi situasi yang demikian inilah yang membuat para orang tua bingung karena harus mondar-mandir mencari informasi dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain dan kemudian mendaftarkan anaknya.

Mengingat sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka hendaknya prinsip yang pertama-tama diterapkan dalam penerimaan siswa baru adalah menerima anak-anak yang berada di sekitar pemukiman sekolah. Terlepas dari berapapun hasil nilai ujian seleksi belajarnya.

Hendaknya sekolah meniadakan persyaratan-persyaratan penerimaan siswa baru dalam konteks hasil nilai ujian seleksi bukankah dengan menerapkan hal tersebut, sekolah telah melakukan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru? Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya meninggalkan tindak diskriminatif dalam proses penerimaan siswa baru. adapun jalan lain untuk menjawab persoalan ini yaitu dengan memberikan kebijakan, terkait hal tersebut, karena sekolah merupakan suatu organisasi pendidikan yang mutlak memiliki kebijakan, mengapa tidak sekolah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Grindle dalam Tasman malusa (2013:21). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. oleh karena itu tidak

terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebaik apapun sebuah kebijakan tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat diterapkan atau di implementasikan sesuai dengan rencana.

Dalam kasus implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan yaitu sekolah, Hough dalam Tasman malusa (2013:21). Memberikan kontribusi pengkajian kebijakan pendidikan. ia juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, Keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta Undang undang atau Peraturan-peraturan. bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5), menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak, dan atau konsekuensi, (6), dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait, sama halnya dengan penerimaan peserta didik baru atau siswa baru dimana memiliki kategori yang sama seperti yang di kemukakan oleh Hough dalam Tasman malusa (2013:21). tapi kebijakan dalam pendidikan seringkali diartikan sebagai aktivitas yang hanya mengevaluasi kegiatan pembangunan saja, dan mengevaluasi anggaran. akan tetapi kebijakan juga membahas aktivitas atau kegiatan pembangunan lainnya, termasuk kegiatan di bidang

pendidikan, seperti penerimaan calon siswa baru yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, dll.

Namun untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yaitu di sekolah tersebut ialah sampai sejauh mana sekolah memberikan, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait kebebasan dan persamaan hak berpendidikan dalam penerimaan calon siswa baru tanpa melihat suatu perbedaan yang berdampak pada tindakan diskriminasi, seperti seleksi penerimaan calon siswa baru yang dilihat dari hasil nilai ujian seleksi untuk bisa masuk di sekolah tersebut, karena sejatinya hal tersebut bukanlah menjadi suatu jaminan untuk sekolah dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas siswa dalam menjalani proses pendidikannya di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa terdorong untuk melihat ada tidaknya implementasi kebijakan serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penerimaan calon siswa baru di SMAN 1 Paguyaman, Dengan merumuskan judul: Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Calon Siswa Baru, (studi kasus Di SMAN 1 Paguyaman).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sekolah dalam penerimaan calon siswa baru di SMAN 1 Paguyaman ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Paguyaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah

1. Untuk mengetahui adanya implementasi kebijakan dalam penerimaan calon siswa baru di SMAN 1 Paguyaman !
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penerimaan calon siswa baru di SMAN 1 Paguyaman !

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ilmiah, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini, peneliti dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan sekolah dalam penerimaan calon siswa baru, dengan di terangkan secara teoritis juga dalam hal pengembangan teori, hasil penelitian ini bisa di kembangkan dan dijadikan direktur dalam pemecahan masalah atau pun ilmu pengetahuan.

b. Manfaat praktis.

Pada priinsipnya penelitian ini akan menghasilkan suatu pemecahan permasalahan serta untuk memperdalam pengetahuan, apa lagi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pendidikan kewargaan negaraan, khususnya pada bidng pendidikan. Disisi lain penelitian ini bisa di jadikan dasar perbaikan dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya sekolah. Serta dapat menjadi bahan sosialisasi bagi sekolah dan

pemerintah agar mereka menyadari dan mengetahui persoalan pendidikan di Indonesia.